

KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : ☐ Kompas ☐ Media Indonesia
☐ Seputar Indonesia
☐ (lainnya)
Harian Lokal : ☐ Radar Banten ☒ Kabar Banten
☐ Banten Raya Post ☐ Satelit News
☐ (lainnya)
Hari/Tanggal : Rabu 2 Juli 2015
Halaman Koran : 3

Waspada! Motif Pragmatis Permohonan Sengketa Informasi

SERANG, (KB).-

Dekan FISIP Unsera Abdul Malik meminta Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten mewaspada! kemungkinan adanya oknum pemohon sengketa informasi yang menjadikan objek sengketa sebagai alat untuk tujuan pragmatisme.

"Keberadaan KI yang sudah memasuki dua periode ini, tampak jelas jumlah sengketa informasi yang sangat banyak. Ada apa ini. Saya mengkhawatirkan, motifnya lebih banyak bukan dalam rangka keterbukaan informasi, tetapi motif lain, yakni yang bersifat pragmatis. Jangan sampai KI hanya dijadikan alat untuk tujuan pragmatis tadi," kata Abdul Malik saat menjadi pembicara pada focus group discussion (FGD) bertajuk Peran Media Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Badan Publik di Banten", Selasa



MAKSUNI HUSEIN/KABAR BANTEN

(30/6/2015). FGD dibuka Ketua KI Banten Maskur didampingi anggota komisioner dan kalangan watawan.

Ia mengatakan, semestinya jika keterbukaan makin baik

maka akan terwujud pemerintahan yang bersih dan baik (clean ang good govermance). "Nyatanya kan, dua tahun Pemprov Banten opini LHP BPK masih disclaimer," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mendorong KI Provinsi Banten lebih banyak melakukan sosialisasi tentang keterbukaan informasi kepada berbagai lembaga publik. Termasuk, kata dia ke kalangan media massa. "Pers memiliki peran strategis dalam mendorong keterbukaan informasi. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi memiliki tujuan yang saling mendukung. Kebebasan pers dan kebebasan informasi, saling mendukung," ucapnya.

Ketua Divisi Sosialisasi Advokasi dan Edukasi (SAE) KI Banten, Ade Jahran mengatakan, peran media sangat penting. Menurut dia, media memiliki informasi yang banyak sehingga memberikan masukan dalam mendorong keterbukaan informasi. (H-32)***